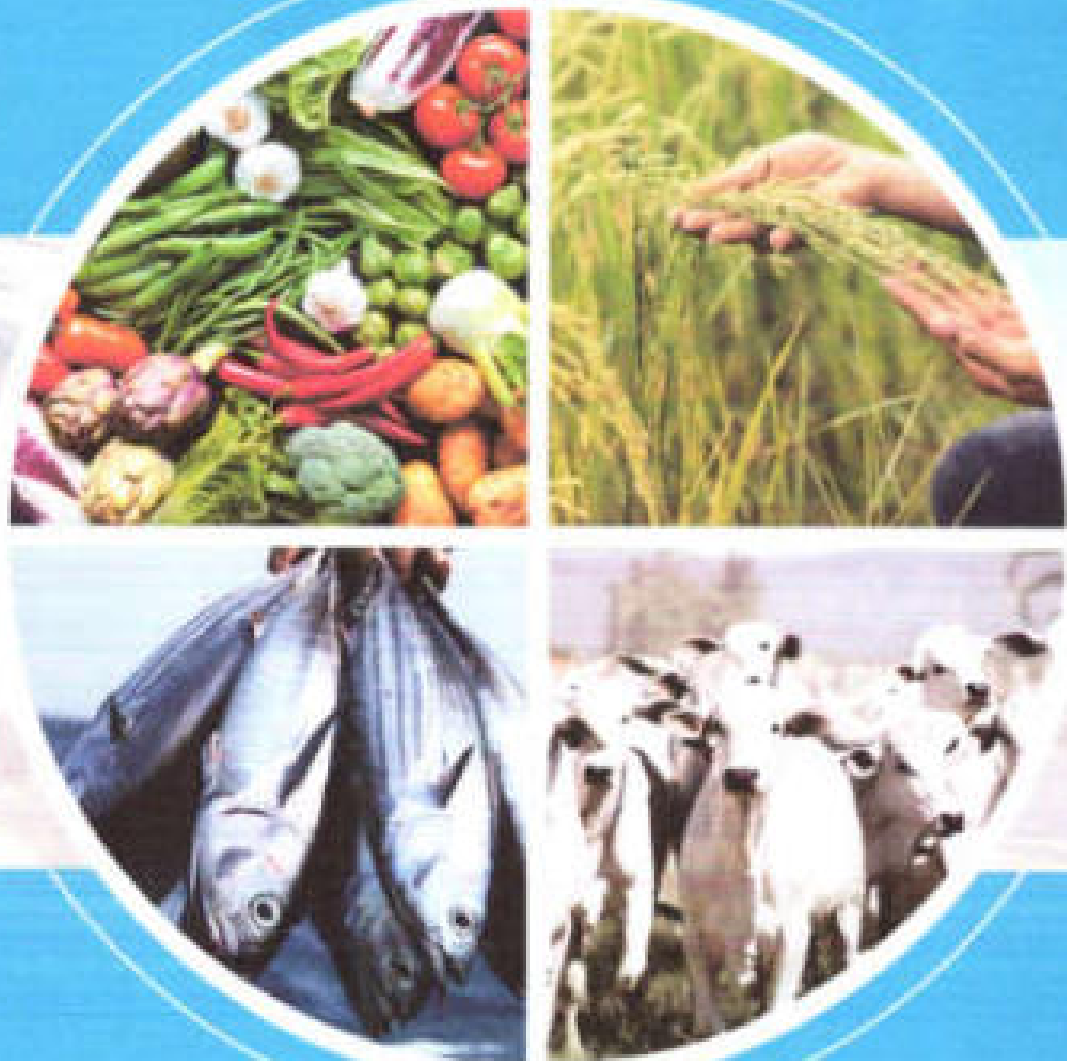


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sesuai visi dan misi yang menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam kurun waktu tahun 2023. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih, serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Laporan ini memuat pencapaian kinerja sasaran, program dan kegiatan sesuai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2023, perbandingan capaian dengan tahun lalu dan perbandingan dengan target RPJMD. Selain itu dalam laporan ini, dijelaskan pula realisasi anggaran pada tahun 2023 serta tingkat efisiensi pencapaian kinerja.

Tingkat pencapaian sasaran pada tahun 2023 berorientasi pada pencapaian Tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun **Terwujudnya Ketahanan Pangan yang Mandiri**, dan akan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja dinas kami pada tahun-tahun mendatang.

Medun, 2024
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN
KOTA MADIUN

TOTOK SUGIARTO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700901 199603 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Gambaran Umum Organisasi	4
BAB II	9
PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Perencanaan Kinerja	9
2.2 Indikator Kinerja Utama	12
2.3 Perjanjian Kinerja	12
BAB III	15
AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	15
3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	16
3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022	18
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD	20
3.1.4 Analisis Penyebab keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	20
3.1.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	32
3.1.6 Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Kinerja	33
3.1.7 Hasil Pelaksanaan Gender Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	42
3.1.8 Inovasi dan Penghargaan	44
3.2 Realisasi Anggaran	45
BAB IV	54
PENUTUP	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 SDM Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun.....	6
Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin, Pendidikan, Gol Ruang....	6
Tabel 1. 3 Permasalahan dan Isu-Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun.....	7
Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.....	10
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019-2024.....	12
Tabel 2. 3 Sasaran Kinerja, Indikator dan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ..	13
Tabel 2. 4 Program dan Anggaran Tahun 2023.....	14
Tabel 3. 1 Metode Penyimpulan Capaian Sasaran.....	15
Tabel 3. 2 Realisasi capaian kinerja Tahun 2023 terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	16
Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023.....	18
Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir RPJMD.....	20
Tabel 3. 5 Skor PPH Kota Madiun tahun 2023.....	22
Tabel 3. 6 Produksi Padi Kota Madiun.....	23
Tabel 3. 7 Produktivitas pertanian Tahun 2019-2023.....	24
Tabel 3. 8 Jumlah Produksi Daging Kota Madiun.....	25
Tabel 3. 9 Data Pelayanan Kewanu Kota Madiun 2019-2023.....	26
Tabel 3. 10 Jumlah Pemotongan Hewan Ternak RPH Kota Madiun 2019-2023.....	27
Tabel 3. 11 Produksi Perikanan.....	29
Tabel 3. 12 Produksi Perikanan Kota Madiun Tahun 2023.....	31
Tabel 3. 13 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	32
Tabel 3. 14 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan DKPP Kota Madiun.....	33
Tabel 3. 15 Realisasi Kegiatan Pengarusutamaan Gender Tahun 2023.....	43
Tabel 3. 16 Daftar Penghargaan yang diperoleh DKPP Tahun 2023.....	44
Tabel 3. 17 Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun	5
Gambar 3. 1 Perkembangan Produksi Padi Kota Madiun 2019-2023.....	24
Gambar 3. 2 Produksi Daging Kota Madiun 2019-2023.....	26
Gambar 3. 3 Pelayanan Kesehatan Hewan di Kota Madiun 2019-2023.....	27
Gambar 3. 4 Jumlah Pemotongan Hewan Ternak Kota Madiun 2019-2023	27
Gambar 3. 5 Perkembangan Produksi Perikanan di Kota Madiun 2018-2022	29

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Terdapat Enam indikator kinerja yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun Tahun 2023 yang telah diselaraskan dengan dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Madiun 2019-2024 dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun Tahun 2019-2024 serta program prioritas Pemerintah Kota Madiun yang lainnya. Dari Enam indikator semua masuk kedalam kriteria diatas ekspektasi karena memiliki nilai kinerja diatas 100 persen. Dengan rincian sebagai berikut :

No	Tujuan	Strategi	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja (%)
1	Terwujudnya ketahanan pangan yang mandiri		Indeks Ketahanan Pangan	80,94	85,32	105
2		Meningkatnya skala pangan dan diversifikasi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	95,8	96,4	101
3		Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	Rasio pendapatan pelaku usaha perikanan dengan Biaya Produksi	1,5	1,51	101
4		Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Rasio Pendapatan Petani dengan Biaya Produksi	1,14	1,14	100
5		Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Peternakan	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan dengan biaya produksi	1,216	1,4	115
6		Meningkatnya tata kelola pemerintahan perwilayah daerah	Nilai Indeks Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	80,1	81,75	105

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik yang disebut *good governance*. *Good governance* bertujuan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat, serta cita-cita bangsa dan negara serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Agar terwujud pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, sistem pemerintahan yang baik hendaknya dapat memenuhi beberapa kriteria, salah satunya dapat melaksanakan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Kepala Daerah menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Dengan demikian, setiap instansi pemerintah wajib melaporkan dan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai tugas dan fungsi masing-masing yang disinkronkan dengan dokumen review Renstra serta Perjanjian Kinerja Perubahan yang memuat capaian kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diampu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun Tahun 2023 merupakan capaian kinerja yang disusun dan disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan DPA APBD TA.2023 dan DPPA P-APBD TA. 2023, yang penyusunannya berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun 2019-2024, Review Renstra 2019-2024, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta wujud pertanggungjawaban kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKjIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun Tahun Anggaran 2023. LKjIP ini memberikan gambaran terhadap kontribusi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Adapun tujuannya adalah:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun selama Tahun Anggaran 2023.
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun pada tahun 2023 dan diharapkan dapat diperoleh

masuk dalam rangka memperbaiki kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun di masa yang akan datang.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun Tahun 2022, dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
4. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah no 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2024;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Walikota Kota Madiun Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan,

- Susunan Organisasi, Rincian tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun;
12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024;
 13. Peraturan Walikota Madiun Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 14. Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

• Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dijabarkan ke dalam Peraturan Walikota Kota Madiun Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, bidang peternakan dan perikanan, serta bidang pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pangan, bidang pertanian, serta bidang perikanan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pangan, bidang pertanian, serta bidang perikanan;
4. Pelaksanaan pembinaan UPTD;
5. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota.

- **Struktur Organisasi**

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun dipimpin oleh pejabat eselon II yaitu kepala dinas yang dibantu oleh empat pejabat eselon III yaitu Sekretaris, Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Kepala Bidang Pertanian, dan Kepala Bidang Perikanan. Sekretariat terdiri dari 1 Kepala Sub Bagian, sedangkan masing-masing bidang terdiri dari Sub koordinator. Adapun bagan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun dapat dilihat dibawah ini.

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun



- **Sumber Daya**

Dalam gambaran umum sumber daya yang digambarkan adalah meliputi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, dapat digambarkan sumber daya manusia sebagai pendukung dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dapat diuraikan sebagai berikut :

Jumlah pejabat struktural yang terisi sesuai dengan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota

Madiun sebanyak 6 orang pejabat. Jumlah pegawai sebagai unsur pelaksana tugas pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun 72 orang.

Struktural	: 6 orang
Fungsional	: 14 orang
Pelaksana	: 6 orang
Tenaga HR/Kontrak	: 5 orang
Tenaga Upahan	: 40 orang
THL / TB	: 1 orang

Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. 1 SDM Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun

No	Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Kepala Dinas	1 orang
2	Sekretaris	1 orang
3	Kepala Bidang	3 orang
4	Kasubag	1 orang
5	Ka UPTD RPH	-
6	Kasubag TU UPTD RPH	-
8	Fungsional	14 orang
7	Pelaksana	6 orang
9	Tenaga Kontrak	5 orang
10	Tenaga Upahan	40 orang
11	THL /TB	1 orang
	Jumlah	72 orang

Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin, Pendidikan, Gol.Ruang

Berdasarkan Kelamin		Berdasarkan Pendidikan		Berdasarkan Gol. Ruang		Berdasarkan Jabatan Struktural		Tenaga Non ASN	
Laki-laki	45 orang	SD	2 orang	I	0 orang	Es Dc/b	0 orang	Femkot	5 orang
Perempuan	27 orang	SMP	0 orang	II	6 orang	Es IV/a	1 orang	Pusat	1 orang
		SMA	32 orang	III	13 orang	Es III/b	3 orang	Upahan	40 orang
		D3	5 orang	IV	7 orang	Es III/a	1 orang		
		S1	31 orang			Es II/b	1 orang		
		S2	2 orang						
Jumlah	72 orang	Jumlah	72 orang	Jumlah	26 orang	Jumlah	6 orang	Jumlah	46 orang

Dari tabel diatas dapat diketahui mayoritas SDM di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah lulusan Sarjana (S1) dan yang berada pada golongan III. Secara kuantitas SDM relatif sesuai dengan tingkat pendidikan dan tupoksi yang melekat di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun.

1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

Tabel 1.3 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun

No	Sifat Urusan	Permasalahan	Isu Strategis
1	Urusan Pangan	Diversifikasi sumber pangan lokal relatif masih terbatas	Penerapan konsumsi pangan secara Bergizi, Bergam, Seimbang dan Aman belum optimal
		Peningkatan akses pangan masyarakat masyarakat lokal dan sudah berkembang tapi belum maksimal	
		Masih rendahnya kapasitas Sumber Daya Manusia pelaku/petani pengolah pangan sebagai salah satu mitra kapasitas supply bahan pangan	
		Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas petugas penyuluh/pendamping pengolahan pangan dan gizi untuk mendukung peningkatan kapasitas pelaku usaha pengolahan pangan	
2	Urusan Perikanan	Keterbatasan lahan untuk pengembangan budidaya perikanan	Inovasi sistem perikanan (teknologi produksi, pengolahan dan pemasaran) belum optimal
		Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia, permodalan, dan infrastruktur di bidang perikanan dan industri perikanan	
		Masih terbatasnya penerapan teknologi tepat guna untuk mengembangkan produk dengan daya saing tinggi berbasis usaha rakyat masyarakat lokal di Kota Madiun	
		Tingginya harga pakan dan tidak diiringi harga jual ikan yang tinggi pula	
3	Urusan Pertanian	Keterbatasan lahan untuk pengembangan sektor pertanian di Kota Madiun meliputi wilayah kota yang kecil	Inovasi sistem pertanian termasuk peternakan dan Kesehatan hewan (teknologi produksi, pengolahan, Unit Pelayanan Jasa
		Tingginya alih fungsi lahan sektor pertanian menjadi non pertanian dan pemukiman penduduk	
		Produksi dan produktivitas komoditas pertanian pangan dan hortikultura belum optimal karena belum diterapkannya sistem pertanian yang modern	

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Tisu Strategis
		<p>Masih rendahnya kapasitas Sumber Daya Manusia petani dalam meningkatkan produksi</p> <p>Kepuasan layanan pelatihan dan pendampingan oleh penyuluh sangat terbatas</p> <p>Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pertanian seperti irigasi</p> <p>Keterbatasan akses petani terhadap permodalan yang berkelanjutan</p> <p>Petani belum mendapatkan keuntungan yang baik mengingat panjangnya tata niaga produk pertanian</p> <p>Generasi muda yang tidak tertarik di sektor pertanian</p> <p>Sumber Daya Manusia petani di dominasi oleh para petani yang sudah tua</p> <p>Terjadinya fluktuasi iklim yang tidak menentu yang banyak menimbulkan kerugian bagi petani</p> <p>Usaha peternakan belum dilakukan dengan intensif (masih menggunakan cara tradisional dan ternak tidak dikandangkan) dan belum menerapkan teknologi terbaru dalam bidang peternakan</p> <p>Harga pakan ternak mahal/tidak terjangkau petani/peternak pengaruh mata uang dolar</p> <p>Belum optimalnya pengawasan produk hasil ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal</p> <p>Masih kurangnya obat-obatan hewan baik jenis maupun jumlahnya</p> <p>Kurangnya peralatan laboratorium dan kesehatan hewan</p> <p>Kurangnya tenaga petugas pemeriksa daging untuk Rumah Potong Hewan</p> <p>Jumlah dokter hewan sangat terbatas</p>	<p>Alat Memin (Pertanian dan Pemasaran) belum optimal</p>

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

Perencanaan merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam perencanaan hal yang diperhatikan adalah Lingkungan Internal (kekuatan dan kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (peluang dan tantangan) suatu organisasi. Perencanaan meliputi penetapan Tujuan, Sasaran serta Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

1. Tujuan dan Sasaran

- a. Tujuan Perangkat Daerah Tujuan jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Madiun adalah **"Terwujudnya Ketahanan Pangan yang Mandiri"**.
- b. Sasaran Perangkat Daerah Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Madiun berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan adalah:
 1. Meningkatnya akses pangan dan diversifikasi pangan masyarakat
 2. Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha perikanan
 3. Meningkatnya kesejahteraan petani
 4. Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha peternakan
 5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan perangkat daerah

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya ketahanan pangan yang mandiri		Indeks Ketahanan Pangan	80,94	80,74	80,84	80,94	81,04
	Meningkatnya akses pangan dan diversifikasi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	95,4	95,5	95,6	95,8	95,8
	Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	Rasio pendapatan pelaku usaha perikanan dengan Biaya Produksi	1,1	1,2	1,25	1,3	1,35
	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Peningkatan produktivitas pertanian (ton/ha)	6,9	7,21	7	-	-
		Rasio Pendapatan Petani dengan Biaya Produksi	1,1	1,1	1,12	1,14	1,16
	Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Peternakan	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan dengan biaya produksi	1,2	1,21	1,214	1,216	1,221
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	18,31	18,31	18,31	-	-
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		-	-	-	80,1	80,1	

2. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal.

Adapun strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan penerapan konsumsi pangan secara B2SA (Bergizi, Beragam, Seimbang dan Aman);
- b. Meningkatkan Inovasi sistem pertanian termasuk peternakan dan kesehatan hewan (teknologi produksi, pengolahan, UPJA/Unit Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian dan pemasaran);
- c. Meningkatkan inovasi sistem perikanan (teknologi produksi, pengolahan, dan pemasaran) belum optimal.

Adapun arah kebijakan yang dilaksanakan untuk mendukung strategi adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan penerapan konsumsi pangan secara B2SA (Bergizi, Beragam, Seimbang dan Aman) di semua kelurahan
- b. Peningkatan peran masyarakat dalam P2L tingkat RW
- c. Peningkatan peran masyarakat dalam pengolahan menu pangan untuk balita stunting, ibu hamil dan lansia
- d. Peningkatan SDM masyarakat terkait skor pola Pangan Harapan
- e. Peningkatan pembinaan struktur SDM kelompok tani
- f. Peningkatan peran masyarakat dalam inovasi pertanian urban terintegrasi yang ramah lingkungan
- g. Peningkatan peran masyarakat dalam pengolahan produk hasil pertanian dan peternakan
- h. Peningkatan peran masyarakat dalam ketersediaan produk pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)
- i. Fasilitasi pemanfaatan Unit Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian untuk kelompok tani
- j. Fasilitasi pemberian subsidi pupuk bagi kelompok tani
- k. Peningkatan peran masyarakat melalui sosialisasi penanganan limbah pertanian dan peternakan
- l. Pemberian kontribusi untuk pengendalian angka stunting kota madian dari bahan makan pokoknya
- m. fasilitasi pembiayaan premi Asuransi Usaha Tani
- n. Menekan penularan penyakit hewan zoonosis (rabies)
- o. Peningkatan SDM masyarakat melalui sosialisasi peraturan perundangan terkait pertanian, peternakan dan kesehatan hewan
- p. Peningkatan pembinaan kelompok pembudidaya, pengolah dan pemasar ikan
- q. Peningkatan peran masyarakat dalam konsumsi ikan
- r. Peningkatan peran masyarakat dalam produksi benih ikan
- s. Pengembangan SDM masyarakat dalam pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

- t. Peningkatan SDM masyarakat melalui sosialisasi peraturan perundangan terkait perikanan
- u. Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya perairan umum

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Madiun telah ditetapkan dalam surat Keputusan Walikota Madiun Nomor : 050-401.204/163/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Madiun Tahun 2019-2024.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019-2024

Indikator	Target Kinerja				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	80,64	80,74	80,84	80,94	81,04
Skor Pola Pangan Harapan (Skor)	95,4	95,5	95,6	95,8	95,8
Rasio pendapatan petani usaha perikanan dengan Biaya Produksi (%)	1,1	1,2	1,25	1,3	1,35
Peningkatan produktivitas pertanian (ton/ha)	6,9	7,21	7	-	-
Rasio Pendapatan Petani dengan Biaya Produksi (%)	1,1	1,1	1,12	1,14	1,16
Rasio Pendapatan Petaku Usaha Peternakan dengan biaya produksi (%)	1,2	1,21	1,214	1,216	1,221
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	18,31	18,31	18,31		
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Skor)				80,1	80,1

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Perjanjian

Kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2023 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Perjanjian Kinerja juga memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja utama dan rencana capaiannya. Pada dokumen ini juga akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun Tahun 2023 secara rinci adalah sebagai berikut :

Tujuan : Terwujudnya Ketahanan Pangan yang Mandiri

Dengan sasaran, indikator dan target sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Sasaran Kinerja, Indikator dan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya akses pangan dan diversifikasi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	95,8 skor
2	Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	Rasio pendapatan pelaku usaha perikanan dengan Biaya Produksi	1,3 rasio
3	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Rasio Pendapatan Petani dengan Biaya Produksi	1,14 rasio
4	Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Peternakan	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan dengan biaya produksi	1,216 rasio
5	Meningkatnya tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	80,1 nilai

Dengan rincian program dan anggaran tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2. 4 Program dan Anggaran Tahun 2023

No	Program	Anggaran
1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 503,271,500.00
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 32,480,000.00
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 78,393,500.00
4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 186,241,000.00
5	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Rp 34,510,000.00
6	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 183,754,000.00
7	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 2,269,957,000.00
8	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 439,684,000.00
9	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp 167,855,000.00
10	Program Perikanan Usaha Pertanian	Rp 33,600,000.00
11	Program Penyuluhan Pertanian	Rp 2,086,055,300.00
12	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 337,591,000.00
13	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6,837,367,500.00
Total		Rp 13,190,659,800.00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan pada Bab ini menggambarkan keberhasilan ataupun ketidaktercapaian dari kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun baik capaian kinerja sasaran strategis yang hendak diwujudkan tahun 2023 maupun capaian realisasi keuangannya. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan dan Pertanian Pangan Perubahan Tahun 2022/23 yang telah disepakati.

Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 3. 1 Metode Pengumpulan Capaian Sasaran

Presentase Capaian Realisasi	Kategori Capaian Kinerja Organisasi	Bobot	Rating Kinerja
>100 %	Sangat Baik /Istimewa	5	Datas Ekspektasi
100 %	Baik	4	Sesuai Ekspektasi
80 % - 99 %	Cukup	3	Dibawah Ekspektasi
60 % - 79 %	Kurang	2	
0 % - 59 %	Sangat Kurang	1	

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pengukuran dan analisis capaian Kinerja berdasarkan Program Pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Pemerintah Kota Madiun 2019-2024 yang telah disandingkan dengan Kepmen 050 Tahun 2020. Capaian indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun juga mengacu pada Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Pengukuran kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pertanian dan Pangan beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Realisasi capaian kinerja Tahun 2023 terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya ketahanan pangan yang mandiri		Indeks Ketahanan Pangan	80,94	85,32	105%
	Meningkatnya akses pangan dan diversifikasi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	95,8	96,4	101%
	Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Pertanian	Rasio pendapatan pelaku usaha perikanan dengan Biaya Produksi	1,3	1,31	101%
	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Rasio Pendapatan Petani dengan Biaya Produksi	1,14	1,14	100%
	Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Peternakan	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan dengan biaya produksi	1,216	1,4	115%
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	80,1	83,75	105%

- a) Realisasi indikator tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan realisasi tahun 2022 yaitu 85,32 indeks karena realisasi tahun 2022 baru didapat pada bulan April 2023.

- b) Realisasi sasaran Meningkatnya akses pangan dan diversifikasi pangan masyarakat yaitu 96,4 skor dengan capaian kinerja 101 %. Hal ini didukung oleh program peningkatan diversifikasi pangan dan ketahanan pangan masyarakat sehingga masyarakat dapat memiliki pola makan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA), serta kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk mengoptimalkan pekarangan sebagai lumbung pangan dan gizi keluarga dan masyarakat.
- c) Realisasi sasaran Meningkatnya kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan yaitu 1,31 % dengan capaian kinerja 101 %. Hal ini dapat didukung dengan mensupport Usaha hasil olahan perikanan melalui program dan kegiatan sesuai Renstra, yang bertujuan meningkatkan konsumsi ikan di Kota Madiun Sehingga semakin gemar masyarakat Kota Madiun mengkonsumsi ikan, maka produksi olahan hasil perikanan akan semakin tinggi pada akhirnya pendapatan pelaku usaha perikanan akan semakin meningkat.
- d) Realisasi sasaran Meningkatnya kesejahteraan petani yaitu 1,14 % dengan capaian kinerja 100 %. Hal ini dikarenakan bantuan pupuk untuk petani telah tersalurkan dengan baik serta kegiatan penyuluhan dan pendampingan untuk petani berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan .
- e) Realisasi sasaran Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha peternakan yaitu 1,4 % dengan capaian kinerja 115 %. Hal ini didukung oleh penurunan kejadian penyakit menular temak di Kota Madiun, sehingga berpengaruh terhadap nilai jual temak yang mengakibatkan Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Peternakan di Kota Madiun.
- f) Realisasi sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah yaitu 83,75 skor dengan capaian kinerja 105 %. Hal ini didukung oleh perencanaan Kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang baik dan berkelanjutan .

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Hasil Pengukuran capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan dengan Realisasi Capaian Kinerja beberapa Tahun Terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Terwujudnya ketahanan pangan yang mandiri		Indeks Ketahanan Pangan	80,64 indeks	80,74 indeks	82,86 indeks	83,32 indeks
	Meningkatnya akses pangan dan diversifikasi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	95,6 skor	95,8 skor	97,1 skor	96,4 skor
	Meningkatnya Kewajuteraan Pelaku Usaha Perikanan	Rasio pendapatan pelaku usaha perikanan dengan Biaya Produksi	2,25	1,43	1,25	1,31
	Meningkatnya Kewajuteraan Petani	Rasio Pendapatan Petani dengan Biaya Produksi	-	1,1	1,10	1,14
		Peningkatan Produktivitas Pertanian	7,24 ton/ha	7,12 ton/ha	6,95 ton/ha	
	Meningkatnya Kewajuteraan Pelaku Usaha Peternakan	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan dengan biaya produksi	1,4	1,4	1,4	1,4
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	23,98 indeks	25,23 indeks	-
		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	80,01 skor	80,79 skor	83,6 skor	83,75 skor

- a) Realisasi Tujuan Terwujudnya ketahanan pangan yang mandiri tahun 2023 yaitu 85,32 meningkat jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2022 sebesar 82,86.
- b) Realisasi sasaran Meningkatnya akses pangan dan diversifikasi pangan masyarakat tahun 2023 yaitu 96,4 skor menurun dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 97,1 skor.
- c) Realisasi sasaran Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha perikanan Tahun 2023 yaitu 1,31 %, meningkat jika dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 1,25%.
- d) Realisasi sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Petani Tahun 2023 yaitu 1,14% meningkat jika dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 1,115%.
- e) Realisasi sasaran Meningkatnya kesejahteraan Pelaku Usaha Peternakan Tahun 2023 sebesar 1,4 % sama dengan capaian tahun 2022 yaitu 1,4 %.
- f) Indikator sasaran Meningkatnya Tata Kelola pemerintahan perangkat daerah mengalami perubahan dikarenakan penyesuaian dengan perjanjian kinerja perubahan tahun 2023 yang telah ditetapkan. Realisasi Tahun 2022 dengan indikator indeks reformasi birokrasi perangkat daerah adalah sebesar 25,33 indeks, sedangkan ditahun 2023 dengan indikator Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah adalah sebesar 83,75 skor.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Hasil Pengukuran capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Tujuan	Sebaran	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Capaian (%)
Terwujudnya ketahanan pangan yang mandiri		Indeks Ketahanan Pangan	81,04	85,32	105%
	Meningkatnya akses pangan dan diversifikasi pangan masyarakat	Suku Pulu Pangan Harapan	30,8	36,4	118%
	Meningkatnya Kesejahteraan Petaku Usaha Perikanan	Rasio pendapatan petaku usaha perikanan dengan biaya produksi	1,35	1,31	97%
	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Rasio Pendapatan Petani dengan Biaya Produksi	1,16	1,14	98%
	Meningkatnya Kesejahteraan Petaku Usaha Peternakan	Rasio Pendapatan Petaku Usaha Peternakan dengan biaya produksi	1,221	1,4	115%
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Nilai Totalasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	80,1	83,75	105%

3.1.4 Analisis Penyebab keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

A. Urusan Pangan

Meningkatnya akses pangan dan diversifikasi pangan masyarakat

- **Faktor Pendorong** : Untuk meningkatkan akses pangan, keamanan pangan dan penganekaragaman pangan masyarakat
- **Faktor Penghambat** : Kurangnya pemahaman masyarakat terkait keamanan dan penganekaragaman pangan
- **Rencana Tindak Lanjut** : Melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat serta monitoring kegiatan yang dilaksanakan secara berkala, agar dapat berjalan dengan maksimal.

Pola konsumsi pangan rumah tangga, yang berarti juga pola konsumsi setiap individu, dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, sosial budaya, sosial ekonomi, dan ketersediaan pangan. Keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan individu akan menentukan kualitas konsumsi di tingkat wilayah. Kualitas konsumsi pangan tercermin pada Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH).

Skor PPH diperoleh dari jumlah Skor PPH dari 9 kelompok pangan yang dibentuk dari proporsi konsumsi energi dan pembobotan masing-masing kelompok bahan pangan. Kesembilan kelompok pangan tersebut meliputi:

- 1) kelompok padi-padian,
- 2) kelompok umbi-umbian,
- 3) kelompok pangan hewani,
- 4) kelompok minyak dan lemak,
- 5) kelompok buah/biji berminyak,
- 6) kelompok kacang-kacangan,
- 7) kelompok gula,
- 8) kelompok sayur dan buah, dan
- 9) kelompok lain-lain.

Skor PPH ideal adalah 100. Capaian Skor PPH pada suatu wilayah diklasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu kurang (Skor PPH < 80), sedang (Skor PPH 80-90), dan baik (Skor PPH > 90). Adapun rumus Skor PPH dapat dilihat sebagai berikut.

$$\text{Total Skor PPH} = \sum_{i=1}^9 \text{Skor PPH}_i ; i: \text{Kelompok Pangan}$$

Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH) Kota Madiun tahun 2023 adalah 96,4. Berdasarkan kategori Skor PPH Kota Madiun tahun 2023 termasuk kategori baik. Hal ini didukung oleh program peningkatan diversifikasi pangan dan ketahanan pangan masyarakat sehingga masyarakat dapat memiliki pola makan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA), serta kegiatan pemberdayaan

masyarakat untuk mengoptimalkan pekarangan sebagai lumbung pangan dan gizi keluarga dan masyarakat.

Tabel 3. 3 Skor PPH Kota Madiun tahun 2023

Kategori Pangan	Standar Nasional					Kota Madiun					
	Berat per kapita		AKE per kapita (kkal / hari)	% AKE Aktual	Skor PPH maks.*	Berat per kapita		AKE per kapita (kkal / hari)	% AKE Aktual	% AKE Aktual	Skor PPH
	g per hari	kg per tahun				g per hari	kg per tahun				
1. Padi-padian	281	105	1.05	50,0	25,0	265,1	97,1	1.055	51,6	50,2	25,0
2. Umbi-umbian	105	38	125	6,0	2,5	38,7	14,1	43	2,1	2,0	1,0
3. Pangan hewani	157	17	252	12,0	24,0	121,9	44,3	283	18,9	13,3	24,0
4. Minyak dan lemak	21	8	210	10,0	5,0	29,0	10,6	219	12,7	12,3	5,0
5. Buah/biji berminyak	11	4	63	3,0	1,0	2,2	0,8	12	0,6	0,6	0,3
6. Kacang-kacangan	37	14	105	5,0	10,0	12,5	11,9	100	4,9	4,9	9,1
7. Gula	31	11	105	5,0	2,5	17,4	6,4	66	3,2	3,2	1,6
8. Sayur dan buah	262	95	126	6,0	30,0	281,7	102,8	174	8,3	8,3	30,0
9. Lain-lain	-	-	63	3,0	0,0	99,1	36,2	51	2,3	2,4	-
Jumlah			2,1	100	100,0			2.043	100,0	97,3	96,4
Pangan hewani			252	12%				283	15,2	14,8	
Pangan nabati			1848	88%				1.733	84,8	82,5	

*Nilai adalah singkatan dari kilogram; **%AKE (hitung berdasarkan AKE nasional 2.100 kkal/kapita/hari (Kementerian RI No. 28 Tahun 2018))

B. Urusan Pertanian

1. Meningkatnya Kesejahteraan Petani

- **Faktor Pendorong** : Meningkatkan Pendapatan Petani.
- **Faktor Penghambat** : Serangan hama dan perubahan iklim yang tidak menentu
- **Rencana Tindak Lanjut** : Meningkatkan kapasitas SDM petani melalui berbagai kegiatan pendampingan, dan pelatihan,

Indikator yang diukur untuk mendukung peningkatan kesejahteraan petani yaitu Peningkatan produktivitas pertanian dan Rasio pendapatan petani dengan biaya produksi. Adapun peningkatan produktivitas pertanian dipengaruhi oleh Jumlah Produksi padi.

Produksi padi mengalami kenaikan dari 16.769 ton pada tahun 2022, menjadi 16.771 ton pada tahun 2023 dengan peningkatan 0,011%. meskipun ada serangan hama penyakit terutama wereng coklat dan tikus selain juga adanya keterlambatan pupuk serta berkurangnya lahan pertanian.

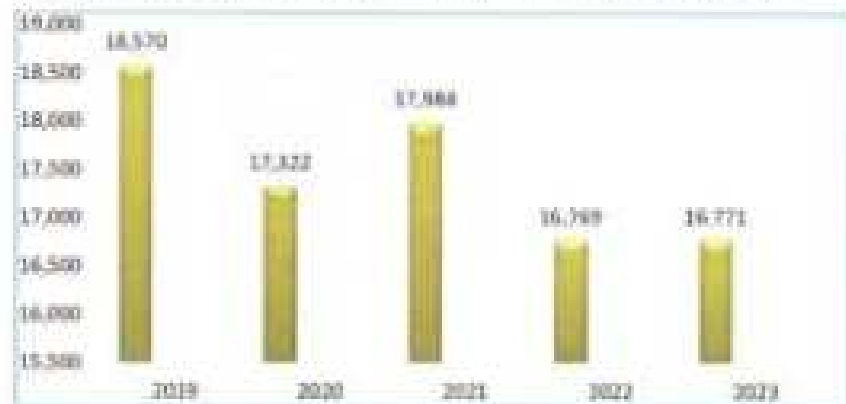
Capaian peningkatan produktivitas pertanian pada tahun 2023 sebesar 6,950 ton/ha, hal ini lebih baik dibanding tahun lalu 6,949 ton/ha karena adanya 33 program unggulan Walikota yang dapat mendukung peningkatannya melalui bantuan NPK Plus maupun pupuk hayati bagi 38 kelompok tani kota Madiun yang ber Badan Hukum Indonesia. Secara teknis, pupuk hayati bermanfaat membantu penguraian / pelepasan unsur hara terutama unsur P yang banyak terikat dalam mineral tanah, sehingga dapat terserap bagi tanaman.

Dan tidak bosan juga kami ingatkan petani untuk mencampur penggunaan pupuk hayati agar kondisi kesuburan tanah tetap terjaga karena secara teknis pupuk hayati bermanfaat membantu penguraian / pelepasan unsur hara terutama unsur P dan K yang banyak terikat dalam mineral tanah, sehingga dapat terserap bagi tanaman

Tabel 3. 6 Produksi Padi Kota Madiun

Kecamatan	Produksi Tahun 2022	Produksi Tahun 2023
Kartharjo	6.570	7.495 ton
Manguharjo	5.845	5.915 ton
Taman	4.354	3.361 ton
JUMLAH	16.769	16.771

Gambar 3. 1 Perbandingan Produksi Padi Kota Madiun 2019-2023



Sumber: Bidang Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun (2023)

Rumus dari produktivitas pertanian yaitu :

$$\begin{aligned} \text{Produktivitas} &= \frac{\text{Produksi (ton)}}{\text{Luas panen (hektar)}} \\ &= \frac{16.771}{2.413} \\ &= 6.950 \text{ ton/ha} \end{aligned}$$

Tabel 3. 7 Produktivitas pertanian Tahun 2019-2023

KECAMATAN	Produktivitas 2019 (Ton/Ha)	Produktivitas 2020 (Ton/Ha)	Produktivitas 2021 (Ton/Ha)	Produktivitas 2022 (Ton/Ha)	Produktivitas 2023 (Ton/Ha)
Kepoharjo	7,22	6,9	7,26	6,94	7,91
Manguharjo	7,2	7,06	7,17	7,09	7,08
Taman	7,2	6,67	6,97	6,90	6,32
Total	7,21	6,8	7,12	6,949	6,958

2. Meningkatnya kesejahteraan Pelaku Usaha Peternakan

1. **Faktor Pendorong** : Meningkatkan Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan.
2. **Faktor Penghambat** : Terjadinya wabah penyakit pada hewan ternak

3. Rencana Tindak Lanjut : Meningkatkan pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan pada pelaku usaha peternakan

Kesejahteraan pelaku usaha peternakan dapat dihitung melalui indikator rasio pendapatan pelaku usaha peternakan dengan biaya produksi. Adapun Jumlah produksi daging dapat dihitung dari jumlah pemotongan ternak di kota Madiun dan jumlah daging masuk dari luar daerah. Jumlah produksi daging sampai akhir Bulan Desember 2023 sebesar 1.918,3 ton. Terjadi peningkatan sebesar 5,25 % dari produksi daging dari Tahun 2022 sebesar 1.822,5 ton.

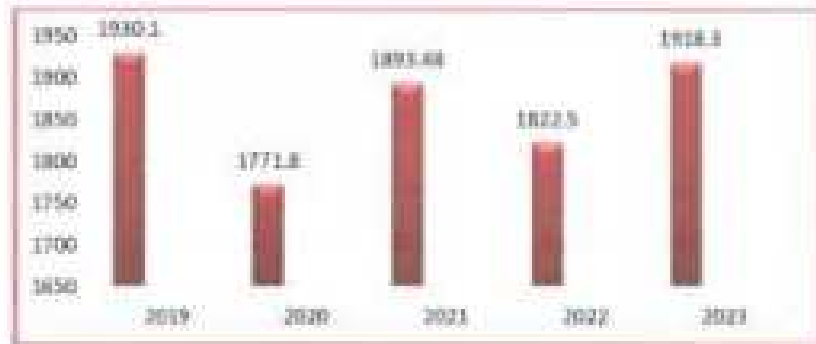
Tabel 2. 8 -Jumlah Produksi Daging Kota Madiun

Jenis Ternak	Jumlah Produksi Daging (ton)	
	2022	2023
Sapi	159	160,9
Kambing	43,5	34,3
Domba	18,2	19,2
Babi	25,5	18,9
Ayam Buras	155,3	154,9
Ayam Petelur	21,9	21,9
Ayam Pedaging	1284,2	1393,1
Itik	86,5	86,4
Entok	17,3	16,9
Kelinci	1,5	1,4
Burung Dara	9,6	9,4
Burung Puyuh	-	0,9
Jumlah	1822,5	1918,3

**Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun 2023*

Peningkatan jumlah produksi daging disebabkan oleh peningkatan jumlah populasi ternak, khususnya ternak sapi potong, domba, ayam pedaging, dan burung puyuh. Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Peternakan di Kota Madiun dapat digambarkan dalam berdasarkan nilai jual ternak dibandingkan dengan biaya produksi yang dikeluarkan.

Gambar 3. 2 Produksi Daging Kota Madiun 2019-2023



Sumber: Bidang Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun (2023)

Jumlah produksi daging di Kota Madiun selain dipengaruhi jumlah pasokan ternak yang dari luar daerah yang dipotong di Kota Madiun, juga dipengaruhi dengan jumlah populasi ternak domestik Kota Madiun.

Adanya kontradiksi kepentingan peternak dengan masyarakat sekitar terhadap polusi limbah peternakan, khususnya untuk lokasi peternakan di sekitar pemukiman, menyebabkan sulit berkembangnya usaha peternakan di perkotaan.

Tabel 3. 9 Data Pelayanan Kesehatan Kota Madiun 2019-2023

NO	Bulan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Januari	26	32	41	75	38
2	Februari	18	27	50	50	87
3	Maret	27	50	41	51	41
4	April	20	17	47	48	25
5	Mei	41	26	52	57	27
6	Juni	13	30	70	154	45
7	Juli	17	23	47	58	66
8	Agustus	9	23	43	45	63
9	September	14	27	50	38	18
10	Oktober	14	19	39	54	42
11	November	22	43	46	49	28
12	Desember	13	38	68	34	35
Jumlah Pelayanan		232	350	396	703	705
Jumlah Kasus Penyakit Menular		86	91	130	414	130
Jumlah Hewan yang dihangus		4774	4235	4218	7711	4218

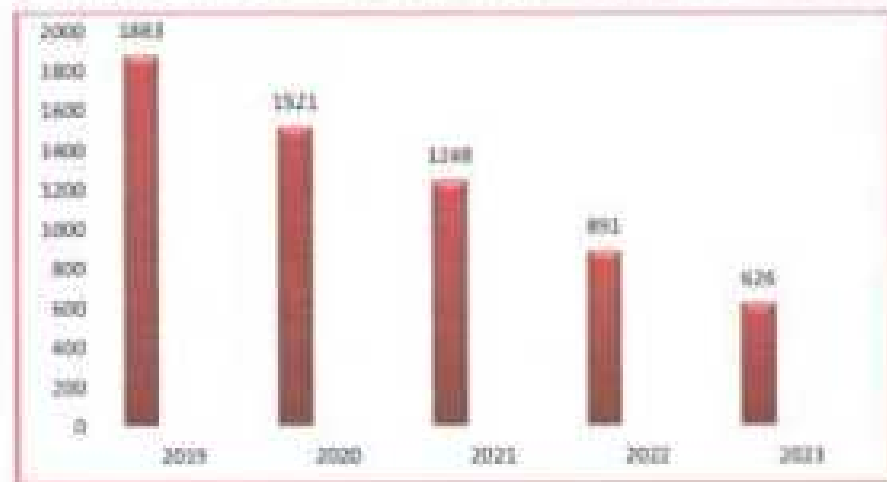
Gambar 3. 3 Pelayanan Kesehatan Hewan di Kota Madiun 2019-2023



Tabel 3. 10 Jumlah Pemotongan Hewan Ternak RPH Kota Madiun 2019-2023

NO	JENIS TERNAK	2019	2020	2021	2022	2023
1	Sapi	138	210	297	237	136
2	Kambing	477	561	452	385	188
3	Kerbau	1088	750	549	274	4
Jumlah		2403	1521	1301	900	328

Gambar 3. 4 Jumlah Pemotongan Hewan Ternak Kota Madiun 2019-2023



Rumus Rasio pendapatan pelaku usaha peternakan yaitu sebagai berikut :

$$\text{Produktivitas} = \frac{\text{Pendapatan Pelaku Usaha}}{\text{Biaya Produksi}}$$
$$= \frac{2.500.000}{1.785.000}$$
$$= 1,4$$

Capaian Rasio pendapatan pelaku usaha peternakan dengan biaya produksi pada tahun 2023 sebesar 1,4 hal ini sama dibanding tahun lalu 1,4 karena pendapatan dan biaya produksi relatif sama dengan tahun 2022. Kegiatan APBD 2023 yang dapat mendukung peningkatannya melalui pelayanan dan pemeliharaan kesehatan hewan/ternak dengan pengobatan gratis untuk ternak di wilayah kota Madiun sehingga ternak di kota Madiun menjadi lebih sehat dan produktif serta menekan angka kematian ternak.

C. Urusan Perikanan

Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan

1. **Faktor Pendorong** : Meningkatkan Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan.
2. **Faktor Penghambat** : kurangnya pengetahuan masyarakat dalam membudidayakan ikan yang baik dan benar
3. **Rencana Tindak Lanjut** : Meningkatkan kapasitas SDM pelaku usaha perikanan dengan melaksanakan penyuluhan dan pelatihan

Adapun faktor yang secara tidak langsung turut berpengaruh terhadap kesejahteraan pelaku usaha perikanan dapat dihitung melalui indikator Rasio pendapatan pelaku usaha perikanan diantaranya yaitu:

- a. Jumlah produksi perikanan terdiri dari produksi perikanan budidaya yang berasal dari kegiatan budidaya ikan air tawar di kolam dan produksi perikanan tangkap yang berasal dari kegiatan penangkapan ikan di sungai bahwa produksi perikanan Tahun 2023 sebesar 379,5 ton mengalami kenaikan dibandingkan produksi

Tahun 2022 sebesar 374 ton, dengan capaian kinerja 101,47% dari target yang ditetapkan pada Tahun 2023 yaitu 374 ton.

- b. Tren produksi perikanan di Kota Madiun cenderung meningkat terutama pada budidaya perikanan di Tahun 2023. Jumlah produksi perikanan terdiri dari produksi perikanan budidaya yang berasal dari kegiatan budidaya ikan air tawar di kolam dan produksi perikanan tangkap yang berasal dari kegiatan penangkapan ikan di sungai.
- c. Selain itu produksi benih ikan di Balai Benih Ikan Kota Madiun sangat membantu para petani pembudidaya ikan dalam penyediaan benih ikan air tawar, yaitu benih ikan nila dan benih ikan lele dengan kuantitas dan kualitas yang terjamin. Produksi benih ikan di BBI tahun 2022 sebesar 334.325 ekor dan tahun 2023 sebesar 340.080 ekor, hal ini mengalami kenaikan sebesar 1,72 %.

Tabel 3. 11 Produk Perikanan

No.	KIPIS/PELUBUK/URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH DAERAH	Target	Achivement	Capaian Kinerja (%)
		Tahun 2023		
1	Jumlah Total Produk Perikanan Budidaya	285 Ton	285 Ton	100 %
2	Jumlah Total Produk Perikanan Tangkap	89 Ton	94,3 Ton	106,2 %
2	Tingkat Konsumsi Makan Ikan	16,1 Kg/ Kapita /Tahun	17,8 Kg/ Kapita /Tahun	110,5 %

Gambar 3. 5 Perbandingan Produksi Perikanan di Kota Madiun 2018-2023



Sumber: Bidang Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun (2023)

- d. Tingkat konsumsi ikan menurut Food and Agriculture Organization (FAO) dapat dihitung dengan menggunakan dua pendekatan yaitu berdasarkan

ketersediaan ikan dan berdasarkan survei konsumen. Untuk penghitungan konsumsi ikan di Kota Madiun, digunakan metode perhitungan berdasarkan ketersediaan ikan, dibagi jumlah penduduk, dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Konsumsi Ikan} = \frac{\text{Ketersediaan Ikan}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

$$\text{Ketersediaan Ikan} = \text{produksi perikanan (budidaya dan tangkap} + \text{pasukan dari luar (jajap)} - \text{pengiriman ikan keluar daerah (ekspor)} + \text{stok (15\%} + \text{produksi perikanan)}$$

$$\frac{285.000 + 94.500 + (4.248.120 \text{ kg} - 2.007.000 \text{ kg}) + 16.320}{20.460} = 17,8 \text{ kg/kapita/th}$$

Berdasarkan rumus di atas tingkat Konsumsi ikan di Kota Madiun mencapai target yang ditetapkan pada 2023 yaitu sebesar 17,8 kg/kapita/tahun. Bila dibandingkan dengan tahun 2022 (16,92 kg/kapita/tahun) terjadi peningkatan konsumsi ikan sebesar 4,4 %. Pencapaian target tersebut didukung adanya kegiatan sosialisasi peningkatan konsumsi ikan di masyarakat terutama di Kota Madiun.

Selain itu kebutuhan konsumsi ikan juga didukung oleh tersedianya produksi perikanan budidaya yang cukup memadai di pasaran. Secara garis besar, tingkat konsumsi ikan per kapita di Kota Madiun selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meskipun nilainya tidak signifikan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi ikan yang mengandung nilai gizi yang tinggi dan sangat baik bagi kesehatan dan kecerdasan. Selain itu juga harus diimbangi dengan peningkatan produksi ikan daerah yang akan mendukung ketersediaan ikan di daerah.

- e. Jumlah sumber daya perikanan dihitung dari jumlah rumah tangga yang melaksanakan kegiatan budidaya perikanan. Berdasarkan Tabel di atas, jumlah petani ikan tahun 2023 sebesar 254 RTP.

Dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar 245 ada peningkatan 3,7 %, hal ini dikarenakan Banyak lahan kolam yang beralih fungsi menjadi bangunan dan pembudidaya yang tidak lagi melakukan kegiatan budidaya ikan, sehingga jumlah RTP turun.

Adapun rumus Rasio Pendapatan pelaku Usaha Perikanan dengan Biaya Produksi yaitu :

Tabel 3. 13 Produk Perikanan Kota Medan Tahun 2023

JENIS USAHA	NILAI PRODUKSI	BIAYA OPERASIONAL	RATIO
BUDIDAYA	8.485.325.000	5.250.000.000	1,34
TANGKAP	2.164.800.000	1.521.216.000	1,42
IKAN SEGAR	54.735.000	41.460.000	1,32
JUJUK	4.443.338.000	3.528.102.500	1,25
Jumlah			1,31
RATA RATA			1,31

Rasio Pembudidaya	=	$\frac{\text{Pendapatan Pelaku Usaha}}{\text{Biaya Produksi}}$	
	=	$\frac{8.485.325.000}{5.250.000.000}$	1,34
Rasio Penangkap Ikan	=	$\frac{\text{Pendapatan Pelaku Usaha}}{\text{Biaya Produksi}}$	
	=	$\frac{2.164.800.000}{1.521.216.000}$	1,42
Rasio Pedagang Ikan Segar	=	$\frac{\text{Pendapatan Pelaku Usaha}}{\text{Biaya Produksi}}$	
	=	$\frac{54.735.000}{41.460.000}$	1,32
Rasio Pengolah Hasil Perikanan	=	$\frac{\text{Pendapatan Pelaku Usaha}}{\text{Biaya Produksi}}$	
	=	$\frac{4.443.338.000}{3.528.102.500}$	1,25

Rasio pendapatan pelaku usaha perikanan didapatkan melalui seluruh penjumlahan Rasio pada jenis usaha perikanan di Kota

Madiun kemudian dirata-rata sehingga diperoleh hasil 1,31. Capaian Kinerja yang ditunjukkan pada indikator Rasio pendapatan pelaku usaha perikanan dengan biaya produksi pada sasaran Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha perikanan memperlihatkan bahwa usaha ini cukup memberikan keuntungan dengan angka Ratio > 1, yaitu 1,31 dari target akhir RPJMD sebesar 1,3. Hal ini dapat didukung dengan mensupport Usaha hasil olahan perikanan melalui program dan kegiatan sesuai Renstra, yang bertujuan meningkatkan konsumsi ikan di Kota Madiun. Sehingga semakin gemar masyarakat Kota Madiun mengkonsumsi ikan, maka produksi olahan hasil perikanan akan semakin tinggi pada akhirnya pendapatan pelaku usaha perikanan akan semakin meningkat.

3.1.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun

Tabel 3.13 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Target	Anggaran	Realisasi		Rasio Realisasi Target (%)	Rasio Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
				Target	Anggaran			
1	Meningkatnya akses pangan dan diversifikasi pangan masyarakat	95,8	614.145,000	96,4	607.024,825	101	98,8	1,2
2	Meningkatnya kesejahteraan Pelaku Usaha Pertanian	1,3	404.988,000	1,31	411.398,125	101	99,3	1,3
3	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	1,14	4.987.155,360	1,14	4.982.885,175	101	99,1	1,1
4	Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	1,318	337.095,000	1,4	333.428,387	110	99,9	1,4
5	Meningkatnya nilai tambah pemerintahan tingkat daerah	90,1	5.837.267,900	93,75	5.864.638,791	105	99,9	14,3

- a) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk sasaran Meningkatnya akses pangan dan diversifikasi pangan masyarakat yaitu 1,2 %, dengan capaian kinerja 101 % dan capaian realisasi anggaran sebesar 98,8 %.

- b) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk sasaran Meningkatnya kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan yaitu 0,8 %, dengan capaian kinerja 101 % dan capaian realisasi anggaran sebesar 99,2 %.
- c) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk sasaran Meningkatnya kesejahteraan Petani yaitu 7,9 %, dengan capaian kinerja 100 % dan capaian realisasi anggaran sebesar 92,1 %.
- d) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk sasaran Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha peternakan yaitu 8 %, dengan capaian kinerja 115 % dan capaian realisasi anggaran sebesar 92 %.
- e) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah yaitu 14,2%, dengan capaian kinerja 105 % dan capaian realisasi anggaran sebesar 85,8 %.

3.1.6 Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program / Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Kota Madiun Kota Madiun pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 14 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan DKPP Kota Madiun

URUTAN	PROGRAM/KEGIATAN K/UIS/REKAYAT	INDIKATOR PROGRAM EFFICIENCY Rasio KAPAL/USUR KONTRAKSI KONTRAKSI (Rasio SIMPAN)	REKAYAT	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	REALISASI KINERJA (%)
1	2	3	4	5	6	7
BIDANG PANGSA	PROGRAM PENGALIHAN UMUM PERMINTAAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Perolehan Implementasi Rasio Perolehan Daerah	100%	100	100	100
	Pemrosesan, Pengangkutan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemrosesan, Pengangkutan, Pengangkutan, Pengangkutan dan Evaluasi Kinerja Perangkat DA	100%	100	100	100
	Wardensi dan Pemeriksaan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Monev Kinerja Monev	Hasil Rasio Capaian Kinerja dan Kinerja Monev Kinerja Monev dan Laporan Kinerja Monev Kinerja Monev Kinerja Monev Kinerja Monev	100%	100	100	100

INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN S/INDIKATOR	DESKRIPSI PROGRAM S/INDIKATOR/KEGIATAN ATAU INDIKATOR/KEGIATAN (DIBERIKAN S/INDIKATOR)	SAFETY	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	REALISASI KINERJA (%)
	Administrasi Keuangan Prangkal Daerah	Proses administrasi keuangan administrasi keuangan	%	100	100	100
	Penyediaan Dap (dan Tanggapan ASB)	Jumlah orang yang mendapat dap dan tanggapan ASB	orang/bulan	27	27	100
	Administrasi Kepegawaian Prangkal Daerah	Proses pengelolaan tenaga ASN yang terampil	%	100	100	100
	Kualitas dan Pelayanan Roster Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Roster Kepegawaian dan Pelayanan Roster Informasi Kepegawaian	dukungan	2	2	100
	Administrasi Umum Prangkal Daerah	Proses administrasi keuangan administrasi umum	%	100	100	100
	Penyediaan Produk dan Pengiriman Kecoa	Jumlah paket produk dan pengiriman kecoa yang diterima	paket	10	10	100
	Penyediaan Keperluan Tegap	Jumlah Laporan Penyediaan Keperluan Tegap	laporan	12	12	100
	Penyediaan Laporan Kendali dan Kontrol MPPH	Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Kendali dan Kontrol MPPH	laporan	12	12	100
	Program Bawang MUDA Daerah Peningkatan Usaha Pembudidayaan Daerah	Proses terdapatnya peningkatan produksi bawang muda daerah usaha pembudidayaan daerah	%	100	100	100
	Kejelasan Biaya dan Pemeriksaan Ombong Kawal atau Pengawasan Laksana	Jumlah Foto Biaya dan Pemeriksaan Ombong Kawal atau Pengawasan Laksana yang Dihasilkan	foto	2	12	600
	Pembudayaan Bawang MUDA Daerah Peningkatan Usaha Pembudidayaan Daerah	Proses terdapatnya peningkatan produksi bawang muda daerah yang hasil diperoleh	%	100	100	100
	Penyediaan dan Penyusunan, Biaya Pembudidayaan, dan Pajak Pembudidayaan Peningkatan Usaha dan Kejelasan Biaya Jalan	Jumlah Dokumen Peningkatan Usaha dan Kejelasan Biaya Jalan yang Diperoleh dan Dihasilkan Pajaknya	foto	24	24	100

INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN SISWA SIKIP/STAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTPUT/KEGIATAN ATAU JANGKAJAWAB SISWA/MS OUTPUT)	SAHABAT	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	REALISASI KINERJA (%)
SIKIP/STAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PERCERAMAHAN SABARA PERTANIAN	Edukasi tentang pemasakan	S	60	60	100
	Program Pengolahan Masakan Pertanian	Penelitian ketersediaan sumber pemasakan berbagai kebutuhan pangan	tidak	75	75	100
	Program Pengolahan Masakan Peningkatan Perikanan Siswa/STAN Sipatikan, Terasan/STAN dan Sipatikan/STAN	Jumlah Program Pengolahan Masakan Peningkatan Perikanan Siswa/STAN dengan Sipatikan, Terasan/STAN dan Sipatikan/STAN	S	1	1	100
	Program Pengolahan Masakan Peningkatan Perikanan	Jumlah Program Pengolahan Masakan Peningkatan Perikanan	S	1	1	100
	Peningkatan Wata dan Perikanan Siswa/STAN Terasan dan Sipatikan/STAN dan Sipatikan/STAN dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penelitian jumlah sumber wata dan perikanan yang tersedia pada	S	75	75	100
	Program Wata Siswa/STAN Terasan, Sipatikan dan Sipatikan/STAN dalam Daerah	Jumlah Program Wata Siswa/STAN Terasan, Sipatikan dan Sipatikan/STAN dalam Daerah	tidak	12	11	100
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PERCERAMAHAN PELABIHAN PERTANIAN	Program pengolahan pemasakan yang berbagai dengan sisa	S	75	75	100
	Program Pengolahan Masakan Pertanian	Penelitian pengolahan pemasakan pemasakan	S	75	75	100
	Penelitian dan Pengolahan Perikanan Peningkatan Perikanan Lulusan	Jumlah penelitian dan pengolahan pemasakan pemasakan pemasakan	tidak	1	1	100
	Program Pengolahan Masakan Pertanian	Penelitian pemasakan pemasakan yang berbagai/STAN dan/STAN	S	45	45	100
	Program Hibah/STAN dan Pengolahan/STAN dalam STAN	Jumlah Hibah/STAN yang Hibah/STAN, Pengolahan/STAN dan/STAN	tidak	1	1	100
	Program Hibah/STAN dan Pengolahan/STAN dalam STAN	Jumlah Hibah/STAN yang Hibah/STAN, Pengolahan/STAN dan/STAN	tidak	1	1	100

INDIKATOR	PROYAKSI/KEGIATAN SUDAH AKHIRAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/REKORD ATAU JADWAL/LOKUS KEGIATAN 2023 DITARGETKAN	SA TUNJUK	TARGET KINERJA	REKORD KINERJA	REALISASI KINERJA (%)
	Penyusunan, Pelaksanaan dan Penyelesaian Perencanaan Perbaikan Layanan	Aspek Perencanaan Perbaikan Layanan yang Ditargetkan, Dilaksanakan dan Dipecahkan	100%	3	3	100
	PERIKAWA PERENCANAAN KEBERADAAN HUBUNG DAN KEBERADAAN MASYARAKAT VETERINER	Perencanaan, pelaksanaan, kegiatan dan pemeliharaan program kesehatan hewan	%	10	10	100
	Penyusunan Kesehatan Hewan, Penyakit dan Pemukiman Daerah Wilayah Persebaran Hewan Melalui Dinas Hewan Kabupaten/Kota	Perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan kesehatan hewan	%	101	100	100
	Perencanaan dan Penyelenggaraan Persebaran Hewan dan Penyakit	Aspek Wilayah Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Persebaran Hewan dan Penyakit	100%	9	9	100
	Penyusunan Pelayanan Jasa Medik Veteriner dan Jasa Medik Veteriner di Daerah Kabupaten/Kota	Aspek pelayanan yang dilaksanakan dan pemeliharaan dan pemeliharaan kesehatan	100%	1	1	100
	Penyusunan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Aspek pelayanan jasa medik veteriner	100%	1	1	100
	Penyusunan dan Penyelenggaraan Persebaran Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Perencanaan, jumlah, kegiatan, pemeliharaan dan pemeliharaan yang dilaksanakan	%	10	10	100
	Penyelenggaraan Uji Coba Hewan dan Penyakit Hewan	Aspek Penyelenggaraan Uji Coba Hewan dan Penyakit Hewan	100%	10	10	100
	Penyelenggaraan Persebaran Hewan dan Penyakit Hewan	Aspek Penyelenggaraan Persebaran Hewan dan Penyakit Hewan	100%	10	10	100
	PROBLEMA PERENCANAAN DAN PERENCANAAN BERKAWA PERTANIAN	Perencanaan, pelaksanaan, kegiatan, pemeliharaan dan pemeliharaan	%	74	100	135
	Perencanaan dan Penyelenggaraan Rencana Persebaran Kabupaten/Kota	Aspek perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan	100/100%	100%	100%	100

tingkat kecukupan gizi:

(1) jika AKE aktual <70% dari AKE standar, maka termasuk kategori defisit berat

(2) jika AKE aktual 70-79% dari AKE standar, maka termasuk kategori defisit sedang

(3) jika AKE aktual 80-89% dari AKE standar, maka termasuk kategori defisit ringan

(4) jika AKE aktual 90-119% dari AKE standar, maka termasuk kategori normal

(5) jika AKE aktual >120% dari AKE standar, maka termasuk kategori melebihi kebutuhan.

2. Indikator Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (Angka Kecukupan Energi) realisasinya hanya 2046 Kkal/per kapita. Hal ini dapat ditingkatkan dengan cara mempertahankan dan meningkatkan pola makan yang B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman) melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan promosi kepada masyarakat dan/atau para pemangku kepentingan lainnya, serta kegiatan yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam rangka membiasakan pola makan B2SA.
3. Indikator Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa dengan Realisasi 38 Kelompok dari Target 39 Kelompok. Dikarenakan Penggabungan kelompok tani kaya tani winongo dengan kelompok tani kaya mukti satu karena berkurangnya wilayah kerja kelompok.

3.1.7 Hasil Pelaksanaan Gender Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Dalam rangka percepatan pengarusutamaan gender di Kota Madiun, telah dilakukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender. Kota Madiun telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2020 tentang pengarusutamaan gender. Dinas ketahanan Pangan dan Pertanian juga telah membentuk tim berdasarkan keputusan kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun nomor : 520/21/401.11.3/2022 tentang focal poin pengarusutamaan gender (PUG) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun.

Pada Tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun telah melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan memperhatikan isu gender sebagaimana data berikut :

Tabel 3. 15 Realisasi Kegiatan Pengarusmertaan Gender Tahun 2023

No	KINDAFA KEMERDEKAAN MUDA	SUBKINDAFA KEMERDEKAAN MUDA	INDUKSI KEGIATAN				BUDAYA			KETERANGAN
			Salah satu jenis	Salah satu jenis	Salah satu jenis	Salah satu jenis	Salah satu jenis	Salah satu jenis	Salah satu jenis	
1	Peningkatan, Pengorganisasian, dan Pemberdayaan Perempuan Pengusaha Desa	Asosiasi dan Perkumpulan Usaha Desa Perempuan dan Wanita Rural (ADPWR)	100 Orang	100 Orang	80 Orang	50 Orang	Rp. 11.000.000	Rp. 10.700.000	Rp. 3.800.000	
2	Adaptasi Organisasi Perempuan Desa	Asosiasi dan Perkumpulan Usaha Perempuan Pengorganisasian	80 Orang	80 Orang	60 Orang	30 Orang	Rp. 9.000.000	Rp. 8.800.000	Rp. 3.700.000	
3	Pelaksanaan Program Target Nasional Pengusaha Perempuan Desa dengan Fokus Pemberdayaan	Pemberdayaan (M) melalui dalam Pengembangan Usaha Perempuan Pengusaha Usaha Perempuan	80 Orang	80 Orang	60 Orang	30 Orang	Rp. 12.000.000	Rp. 12.000.000	Rp. 3.800.000	
4	Pelaksanaan Program Target Nasional Pengusaha Perempuan Desa dengan Fokus Pemberdayaan	Pengorganisasian dan Penguatan Target Nasional Pengusaha Perempuan Desa	80 Orang	80 Orang	60 Orang	30 Orang	Rp. 11.000.000	Rp. 10.800.000	Rp. 3.800.000	
5	Pelaksanaan Program Nasional Pengusaha Perempuan Desa	Pengorganisasian dan Penguatan Target Nasional Pengusaha Perempuan Desa	100 Orang	100 Orang	80 Orang	40 Orang	Rp. 11.000.000	Rp. 10.800.000	Rp. 3.800.000	
6	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan dan Penguatan Pemberdayaan Perempuan	80 Orang	80 Orang	60 Orang	30 Orang	Rp. 11.000.000	Rp. 10.800.000	Rp. 3.800.000	
7	Pengorganisasian dan Pemberdayaan Perempuan Pengusaha Perempuan Desa dengan Fokus Pemberdayaan	Pengorganisasian dan Penguatan Target Nasional Pengusaha Perempuan Desa	80 Orang	80 Orang	60 Orang	30 Orang	Rp. 11.000.000	Rp. 10.800.000	Rp. 3.800.000	
8	Pemberdayaan Perempuan Pengusaha Perempuan Desa	Pemberdayaan dan Penguatan Pemberdayaan Perempuan	80 Orang	80 Orang	60 Orang	30 Orang	Rp. 11.000.000	Rp. 10.800.000	Rp. 3.800.000	
9	Peningkatan dan Penguatan Sektor Perempuan Pengusaha Perempuan Desa	Pengorganisasian dan Penguatan Target Nasional Pengusaha Perempuan Desa	80 Orang	80 Orang	60 Orang	30 Orang	Rp. 11.000.000	Rp. 10.800.000	Rp. 3.800.000	
10	Peningkatan dan Penguatan Sektor Perempuan Pengusaha Perempuan Desa	Pengorganisasian dan Penguatan Target Nasional Pengusaha Perempuan Desa	80 Orang	80 Orang	60 Orang	30 Orang	Rp. 11.000.000	Rp. 10.800.000	Rp. 3.800.000	
11	Peningkatan dan Penguatan Sektor Perempuan Pengusaha Perempuan Desa	Pengorganisasian dan Penguatan Target Nasional Pengusaha Perempuan Desa	80 Orang	80 Orang	60 Orang	30 Orang	Rp. 11.000.000	Rp. 10.800.000	Rp. 3.800.000	
12	Peningkatan dan Penguatan Sektor Perempuan Pengusaha Perempuan Desa	Pengorganisasian dan Penguatan Target Nasional Pengusaha Perempuan Desa	80 Orang	80 Orang	60 Orang	30 Orang	Rp. 11.000.000	Rp. 10.800.000	Rp. 3.800.000	
13	Peningkatan dan Penguatan Sektor Perempuan Pengusaha Perempuan Desa	Pengorganisasian dan Penguatan Target Nasional Pengusaha Perempuan Desa	80 Orang	80 Orang	60 Orang	30 Orang	Rp. 11.000.000	Rp. 10.800.000	Rp. 3.800.000	
14	Peningkatan dan Penguatan Sektor Perempuan Pengusaha Perempuan Desa	Pengorganisasian dan Penguatan Target Nasional Pengusaha Perempuan Desa	80 Orang	80 Orang	60 Orang	30 Orang	Rp. 11.000.000	Rp. 10.800.000	Rp. 3.800.000	
TOTAL			800 Orang	800 Orang	600 Orang	300 Orang	Rp. 110.000.000	Rp. 108.000.000	Rp. 38.000.000	

3.1.8 Inovasi dan Penghargaan

Adapun penghargaan yang diperoleh oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 15 Daftar Penghargaan yang diperoleh DKPP Tahun 2023

NO	NAMA PENGHARGAAN	INSTANSI	DOKUMENTASI
1	2	3	4
1.	Juara ke III Kota Dengan Kinerja Vaksinasi PMK Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Timur	Satgas Penanganan PMK Provinsi Jawa Timur	
2.	Penghargaan Upaha Peningkatan Konsumsi Ikan "Terbaik"	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	

3.2 Realisasi Anggaran

Pelaksanaan program/kegiatan anggaran belanja langsung Tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp 13.190.659.800, - dan terealisasi sebesar Rp 11.786.162.215,- atau terserap sebesar 94,63 %. Adapun anggaran yang tidak terserap pada Tahun 2023 dikarenakan efisiensi anggaran (sisa kontrak) dan adanya mutasi pegawai pensiun 2 orang dan 1 sub koordinator yang kosong serta pencairan TPP beban kerja dan Prestasi Kerja sangat dipengaruhi oleh tingkat kehadiran PNS dan serapan anggaran OPD. Adapun rincian Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 17 Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

URUTAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		REALISASI KINERJA (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DINAS BUDUK DAN PANGAN	PROGRAM PERKULIAH DINAS PEMERINTAH AP (DARAH KABUPATEN/ KOTA	Rinc Realisasi Implementasi SAGP Perangai Daerah	Rinc	4	4.827.287,000	4	3.864.616,791	100,0	85,8
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangai Daerah	Perentase Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangai Daerah (%)	%	100	113.648,000	100	113.762,000	100,0	99,9
	Kontribusi dan Pengukuran Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja (MPLI)	Jumlah laporan capaian kinerja dan kinerja realisasi kinerja (MPLI) dan laporan hasil implementasi program/kegiatan regional, kabupaten/kota dan kinerja realisasi kinerja (MPLI)	laporan/ta	0	113.648,000	0	113.762,000	100,0	99,9
	Aktivitasional Kinerja Perangai Daerah	Perentase perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja	%	100	5.133.487,000	100	4.082.875,000	100,0	81,3
	Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah orang yang menerima gaji -Gaji terdapat PNS	orang/bulan	27	5.133.487,000	27	4.082.875,000	100,0	81,3

URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		REALISASI KINERJA (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	Administrasi Pengelolaan Perangai Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	%	100	16.076,000	100	13.441,000	100,0	86,1
	Kelembagaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Pemerintahan	Dokumen	2	16.076,000	2	13.441,000	100,0	86,1
	Administrasi Daerah Perangai Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administratif umum	%	100	1.186.741,000	100	1.179.188,081	100,0	99,4
	Pengelolaan Perawatan dan Perbaikan/pekerjaan Kantor	Jumlah paket pekerjaan dan perolehan/pekerjaan Kantor yang direalisasikan	Paket	11	771.340,000	11	764.726,512	100,0	99,1
	Pemeliharaan Sarungpraga-Tanah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Sarungpraga-Tanah	Laporan	12	23.776,000	12	23.296,000	100,0	99,4
	Pengelolaan dan Pemeliharaan Kelembagaan dan Sarungpraga- BMDP	Jumlah Laporan Pemeliharaan Ruang Kelembagaan dan Sarungpraga BMDP	Laporan	17	641.225,000	17	631.248,274	100,0	100,0
	Pengelolaan Sarungpraga Wilayah Perangai Daerah Persekitaran Daerah	Persentase tercapainya pemenuhan kebutuhan sarungpraga wilayah daerah persekitaran daerah	%	100	76.488,000	100	76.488,000	100,0	99,9
	Pengelolaan Sarungpraga dan Pemeliharaan Sarungpraga Kantor atau Sarungpraga Lainnya	Jumlah Unit Sarungpraga dan Pemeliharaan Sarungpraga Kantor atau Sarungpraga Lainnya yang direalisasikan	unit	2	76.488,000	2	76.448,224	100,0	99,9
	Pemeliharaan Sarungpraga Wilayah Perangai Daerah Persekitaran Daerah	Persentase tercapainya pemeliharaan sarungpraga wilayah daerah yang layak digunakan	%	100	2.10.441,400	100	209.448,224	100,0	99,9
	Pengelolaan dan Pemeliharaan, serta Pemeliharaan dan Pelembagaan Sarungpraga Daerah dan Sarungpraga Daerah Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarungpraga Daerah dan Sarungpraga Daerah Lainnya yang direalisasikan dan dibayarkan Pajaknya	unit	44	66.204,000	44	64.227,812	100,0	98,1
	Pemeliharaan Perawatan dan Sarungpraga Lainnya	Jumlah Perawatan dan Sarungpraga Lainnya yang direalisasikan	unit	12	12.284,000	12	12.225,764	100,0	91,8

URUTAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		REALISASI KINERJA (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	Penyusunan dan Penyempurnaan Sistem Pengendalian Mutu Sistematis Pangan Berbasis Bukti Pada Level Lokal	Jumlah Penyelenggaraan Sistematis Mutu Lokal dalam Pengembangan dan Pemertan Pangan Berbasis Bukti Pada Level Lokal	Agenda	3	120.000.000	3	120.000.000	100,0	99,8
	PROGRAM PENGUKURAN KEMAMPUAN PASAR	Peningkatan tingkat nilai dan volume pangan	%	25	32.493.800	25	32.473.700	100,0	100,0
	Penyusunan Peta Kawasan dan Kawasan Pangan Berkeadilan	Terlaksananya peta kawasan pangan dan kawasan pangan	Belum ada	1	32.493.800	1	32.473.700	100,0	100,0
	Penyusunan, Penyebaran dan Analisis Peta Kawasan dan Kawasan Pangan Berkeadilan	Peta dan Analisis Kawasan dan Kawasan Pangan yang Diimplementasikan	Belum ada	1	32.493.800	1	32.473.700	100,0	100,0
	PROGRAM PENGUKURAN KEMAMPUAN PASAR	Peningkatan pangsa pasar pangan segar	%	80	74.870,075	80	74.870,075	100,0	99,3
	Pelaksanaan Program Kawasan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya program kawasan pangan segar	Lokal	8	74.870,075	8	74.870,075	100,0	99,3
	Program Strategis Kawasan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Strategis Kawasan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Ditindak	Belum ada	1	31.200,000	1	31.200,000	100,0	97,0
	Peningkatan Kapasitas dan Peningkatan Program Mutu dan Keamanan Pangan Segar Lokal Transisi Daerah Kabupaten/Kota	Harapan Daerah dan Peningkatan Program Mutu dan Keamanan Pangan Segar Lokal Transisi Daerah Kabupaten/Kota	Belum ada	1	31.200,000	1	31.200,000	100,0	94,4
URUTAN PERENCANAAN	PROGRAM PENYUSUNAN RENCANA BUDGET	Jumlah total proposal perbaikan wilayah	lks	280	180.241,000	280	180.241,000	100,0	99,1

URUTAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		REALISASI KINERJA (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penerapan prosedur rujukan dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	10	337.391,000	38	610.426,000	280,0	92,0
	Program Kesehatan Hewan, Partisipasi dan Pendidikan Daerah Melalui Penyuluhan Hewan Melalui Jalur Daerah Kabupaten/Kota	Penerapan pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan	%	80	133.100,000	100	200.382,000	120,0	99,0
	Program dan Penyelenggaraan Penyuluhan Hewan dan Kesehatan	Jumlah Wilayah Penyelidikan dan Penyelenggaraan Penyakit Hewan dan Kesehatan	Agenda 1	4	244.000,000	4	291.270,000	100,0	99,0
	Program Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Biotek Veteriner Jalur Daerah Kabupaten/Kota	Jenis pelayanan yang dikembangkan & jasa untuk veteriner dan peternak veteriner	Jenis	1	11.000,000	1	180.000	100,0	9,9
	Pelayanan Perawatan Jasa Biotek Veteriner	Jumlah pelayanan jasa untuk veteriner	Agenda 2	1	11.000,000	1	180.000	100,0	9,9
	Penerapan dan Pengembangan Penyelenggaraan Tindakan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan jumlah sampel profilak saat hewan yang akan dibesarkan	%	80	87.000,000	80	70.000,000	100,0	91,1
	Pengembangan dan Peningkatan Hewan dan Peternakan	Peningkatan Penyelenggaraan Unit Usaha Hewan dan Peternakan	Agenda 3	10	61.241,000	80	91.241,000	280,0	83,8
	Program Peningkatan Hewan dan Peternakan	Jumlah Pengembangan Usaha Hewan dan Peternakan	Agenda 3	10	61.241,000	12	91.241,000	120,0	99,0
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PERANGKULAN BAKTERI BERTAHAN PERTANIAN	Penerapan jumlah kasus bakteri pertanahan	%	74	187.000,000	100	109.018,000	138,1	92,4
	Program dan Penyelenggaraan Usaha Pertanian	Lasa kasus kasus bakteri pertanahan	kuantitas	1000	187.000,000	200	109.018,000	127,7	92,4

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun Tahun 2023 ini sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun berdasarkan suatu sistem akuntabilitas serta sebagai bahan dalam pengambilan keputusan ke arah perbaikan di masa yang akan datang untuk mencapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Kinerja Sasaran. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun berkategori baik dengan rata-rata capaian indikator sasaran sebesar 104,5 %.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun Tahun 2023 ini dibuat dan disajikan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun sebagai lembaga pemerintah daerah yang bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah.